

**PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KB**

(Tugas Akhir)

Oleh

Erdy Citra Arikofitri
NPM 1706071023



**PROGRAM STUDI D3 HUBUNGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KB

Oleh

ERDY CITRA ARIKOFITRI

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi masalah yang cukup serius apabila tidak segera mendapat pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Salah satu cara menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui Program Keluarga Berencana. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Peranan Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mensosialisasikan Program KB. Dalam memperoleh data ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik perpustakaan.

Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dalam pengendalian jumlah penduduk Kota Bandar Lampung melibatkan peran aktif masyarakat serta melakukan kerjasama yang baik. Setiap kebijakan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana dalam upaya pengendalian jumlah penduduk disampaikan langsung kepada masyarakat dan lembaga pemerintah maupun swasta baik melalui media sosial ataupun secara langsung. Setiap kebijakan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana dalam upaya pengendalian jumlah penduduk disampaikan langsung kepada masyarakat dan lembaga pemerintah maupun swasta baik melalui media sosial ataupun secara langsung. Semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana. Hasil kajian yang diperoleh bahwa Dinas PPKB Kota Bandar Lampung telah menjalankan tugasnya sebagai *communicator*, membina *relationship*, sebagai pendukung dalam organisasi, dan membentuk *cooperate image* sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Humas, Dinas PPKB

**PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KB**

Oleh

Erdy Citra Arikofitri

Tugas Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi D3 Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Tugas Akhir : **PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM MENSOSIALISASIKAN
PROGRAM KB**

Nama Mahasiswa : **Erdy Citra Arikofitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1706071023**

Program Studi : **D3 Hubungan Masyarakat**

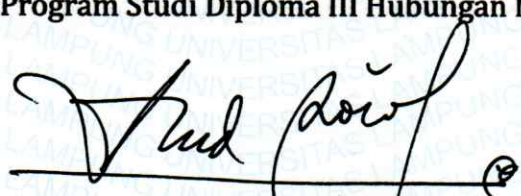
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Fri Rejeki Noviera, S.Kom., M.Si.
NIP 19721117 200604 2 001

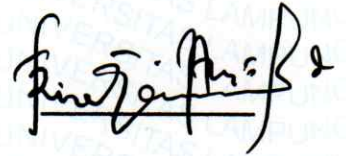
2. **Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat**


Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos., M.Si.
NIP 19810502 200812 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Fri Rejeki Noviera, S.Kom., M.Si.



Penguji Utama : Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Desember 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erdy Citra Arikofitri

NPM : 1706071023

Jurusan : D3 Hubungan Masyarakat

Alamat : Jl. Gotong Royong Gg. Manunggal N0. 242 Kotabumi

No. Telp : +6282182484929

Dengan ini menyatakan, bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul “ **Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Program KB** “ adalah benar-benar hasil karya ilmiah sendiri, bukan Plagiat (milik orang lain) atau dibuat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya, ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan pihak manapun.

Bandar Lampung, 14 Februari 2022
Yang membuat Pernyataan,



Erdy Citra Arikofitri
NPM. 1706071023

RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan anak pertama (1) dari tiga (3) bersaudara. Yang lahir pada tanggal 27 Januari 1999 dan diberi nama Erdy Citra Arikofitri dari kedua orang tua bernama Eriz Pramadisay dan Maryamah. Di waktu Sekolah Dasar (SD) penulis pernah bersekolah di SD Negeri 4 Tanjung Aman, lalu semasa sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) penulis bersekolah di SMP Negeri 7 Kotabumi dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Kotabumi. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Diploma Hubungan Masyarakat Angkatan 2017.

Demikian riwayat hidup penulis.

MOTTO

“ Yang Membedakan Orang Sukses Dan Tidak Adalah Ketekunan “

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Kupersembahkan

Tugas Akhirku ini kepada:

Kedua orang tuaku, yang senantiasa memberikan kasih sayangnya, yang selalu berdoa dan bersabar menanti keberhasilanku, saudara-saudara kuyang senantiasa memberikan dukungannya, dan teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu serta yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Teruntuk Almamater kebanggaan Universitas Lampung, tempat memperoleh Ilmu dan merancang mimpi yang jadi sebagian jejak langkah menuju Keberhasilan dan Kesuksesan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Segala puji hanya bagi Allah SWT Sang Maha Penyayang atas limpahan kasih, berkah, dan rahmat yang diberikan disetiap rahmatnya, memberikan segala hal yang terbaik, memberikan kesempatan hidup di alam yang nyata, memilhkan orang-orang terbaik “semoga kesempatan ini dapat saya pergunakan sebaik-baiknya dan kembali padaMU dengan ikhlas” Aamiin.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini. Suatu proses yang sulit tapi sangat penulis nikmati. Begitu banyak cobaan dan hambatan yang ditemui ketika akan memulai. Namun berkat bantuan, dorongan, dan kepercayaan yang tulus dari berbagai pihak utamanya dukungan moril yang membuat penulis berhasil melewati semuanya. Terima kasihku utamanya untuk, kedua Orang Tuaku Ayahanda dan Ibunda atas kasih sayang, cinta, pengertian, bimbingan dan nasehat, dua orang yang tidak kenal lelah berusaha keras untuk menyediakan semuanya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh dosen-dosen Hubungan Masyarakat Universitas Lampung yang telah menguatkan hati dan membuat penulis bangga mendalami suatu bidang ilmu yang mulanya tidak pernah terpikirkan sama sekali.

1. Bapak Ahmad Rudy Fardiyana, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Diploma III Hubungan Masyarakat Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya selama ini.
2. Ibu Fri Rejeki Noviera, S.Kom., M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberi arahan dan bimbingan selama ini.
3. Ibu Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si yang bersedia menjadi Dosen Penguji Tugas Akhir.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang telah memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Untuk Ayah dan Ibu yang telah mendukung memberi semangat dan mendoakan penulis selama kuliah.
6. Untuk Adik-Adikku & Keluarga Besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir.
7. Kepada Seluruh Staff Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang membimbing penulis selama magang selama 40 hari.
8. Untuk sahabat-sahabatku Retno, Ajeng, Salwa, Vina, Malisa yang selalu mensupport dan telah memberikan motivasi terhadap penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hubungan Masyarakat 2017 dan yang lainnya.
10. Almamater Universitas tercinta.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Aamiin

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	6
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Kegunaan Penelitian	7
1.5	Metode Penelitian	7

BAB II KAJIAN TEORI

2.1	Peranan.....	9
2.2	Humas	10
2.2.1	Pengertian Humas.....	10
2.2.2	Humas dan Komunikasi	11
2.2.3	Peranan Humas.....	12
2.2.4	Fungsi Humas Dalam Organisasi	15
2.3	Sosialisasi	17
2.3.1	Pengertian Sosialisasi	17
2.4	Program Keluarga Berencana.....	19
2.4.1	Pengertian Keluarga Berencana	19
2.4.2	Tujuan Program Keluarga Berencana	20
2.4.3	Sasaran Program Keluarga Berencana	20

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1	Gambaran Umum.....	23
3.2	Sejarah Singkat	23
3.3	Visi dan Misi.....	24
3.4	Tugas dan Fungsi	25
3.5	Uraian Tugas.....	26
3.6	Struktur Organisasi	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil	39
4.1.1 Peranan Bidang Penyuluhan Dinas P2KB	39
4.2 Pembahasan.....	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi masalah yang cukup serius apabila tidak segera mendapat pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Jika jumlah kelahiran tinggi, maka kesejahteraan penduduk akan rendah yang disebabkan oleh semakin banyaknya beban yang akan ditanggung oleh kepala keluarga.

Salah satu cara menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui Program Keluarga Berencana, Sebagaimana telah diketahui di dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa: Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan yang tinggi dengan melakukan program Keluarga Berencana yang dinaungi oleh Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bandar Lampung serta Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1)Pengendalian Penduduk, 2)Keluarga Berencana (KB), 3)Keluarga Sejahtera, serta 4)Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu urusan wajib pemerintah diantaranya penanganan bidang kesehatan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan kependudukan dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang Undangan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan program KB.

Fertilitas yang tinggi dapat memengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk. Menurut Mantra (2015), fertilitas berarti terlepasnya bayi dari rahim seorang

perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Tingginya tingkat fertilitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia perkawinan pertama dan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS). Usia perkawinan pertama seorang perempuan memengaruhi panjangnya masa melahirkan sehingga dapat meningkatkan jumlah fertilitas. Selanjutnya semakin banyaknya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) akan memperbesar peluang banyaknya kelahiran. Oleh karena itu, banyaknya jumlah anak juga akan memperbesar tanggungan kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Dengan demikian, pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera. Oleh sebab itu sasaran dari kebijakan Keluarga Berencana ini adalah meningkatkan Peserta KB Aktif.

Menurut Silviani (2020) Humas adalah fungsi manajemen yang unik yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerjasama antara organisasi dan publiknya. Sedangkan menurut Nurtjahjani dan Trivena (2018) Humas adalah penyelenggaraan komunikasi timbal balik antara suatu lembaga dengan publik yang mempengaruhi sukses tidaknya lembaga tersebut. Dari pihak suatu lembaga, komunikasi seperti ini ditujukan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan kebijakan dan tindakan lembaga tersebut.

Silviani (2020) berpendapat bahwa setiap organisasi memang melakukan berbagai bentuk Humas dan ada berbagai sudut pandang dalam melihat Humas, yaitu Humas sebagai suatu profesi, Humas sebagai suatu divisi/departemen,

Humas sebagai suatu aktivitas, Humas sebagai fungsi manajemen dan Humas sebagai suatu ilmu. Sesuai dengan pernyataan tersebut Dinas PPKB Kota Bandar Lampung menjadikan Humas sebagai suatu aktivitas dan sebagai suatu ilmu, hal ini karena Dinas PPKB Kota Bandar Lampung tidak ada divisi atau bagian Humas secara khusus.

Sebagai instansi daerah yang berkewajiban melaksanakan program KB Dinas PPKB Kota Bandar Lampung memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal ini sosialisasi merupakan sarana yang penting untuk menghubungkan antara Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dengan masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Kegiatan Program KB memerlukan Humas sebagai sarana yang menciptakan komunikasi timbal balik antara Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dengan pihak yang terlibat, Dinas PPKB Kota Bandar Lampung tidak memiliki divisi atau bidang Humas secara khusus akan tetapi proses sosialisasi tetap berjalan baik meskipun bukan dari divisi atau bidang Humas secara langsung.

Dinas PPKB Kota Bandar Lampung memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan jumlah penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung. Di Dinas PPKB Kota Bandar Lampung Memiliki Bidang Penyuluhan dan Penggerakan yang mempunyai peranan penting sebagai pengelola, penggerak, memberdayakan serta memberikan pendekatan kepada masyarakat dan seluruh pihak-pihak yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program KB. Umumnya permasalahan yang sering dijumpai berkaitan dengan pelaksanaan program KB

di Kota Bandar Lampung adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana dengan baik, karena minimnya penyuluhan tentang KB.

Dalam melaksanakan program KB Dinas PPKB Kota Bandar Lampung yang merupakan tombak pengelola KB di lapangan, dalam menyukseskan program KB penyuluh lapangan mempunyai tugas yang besar untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Penyuluh KB Kota Bandar Lampung yang dalam aktivitas sehari-harinya adalah melaksanakan komunikasi timbal balik antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagai tercapainya suatu tujuan tertentu.

Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh KB dalam mensosialisasikan program KB sangat erat hubungannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Penyuluh KB berkewajiban memberikan informasi aktual, terutama informasi yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar publik menangkap informasi yang diberikan. Dari hal ini terlihat bahwa penyuluh KB memiliki peranan penting untuk melaksanakan program, mengelola dan mengembangkannya. Ketika program-program yang dilaksanakan Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses, maka berbagai persoalan mengenai masalah peningkatan penduduk, perkawinan usia dini, masalah pengangguran, atau berbagai program yang telah dibuat oleh Negara Indonesia melalui BKKBN akan semakin

berkurang sehingga masalah-masalah dapat berkurang dan membawa perubahan bagi masyarakat, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tugas akhir ingin mengetahui sejauh mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam menjalankan perannya untuk mensosialisasikan program KB di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, peneliti mengangkat permasalahan untuk di kaji, yaitu : Bagaimana peranan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam Mensosialisasikan Program KB.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui peranan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam Mensosialisasikan Program KB.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada tugas akhir ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) DIII Hubungan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan program KB.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Teknik Observasi

Cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung di tempat kejadian pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan penulis yaitu kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), observasi ini dilakukan pada tanggal 13 Januari - 28 Februari 2020.

2. Teknik Wawancara

Merupakan Interaksi berencana melalui tatap muka di tujukan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber bapak Adzari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

3. Penelitian Perpustakaan

Teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari, mencatat, dan menyalin teori-teori *literature* yang berhubungan erat dan menunjang dengan penyusunan tugas akhir.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Peranan

Pengertian Peranan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. Peranan adalah mencakup tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status social. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan peranan adalah status yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memegang posisi dalam suatu posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

2.2 Humas

2.2.1 Pengertian Humas

Humas atau yang dalam bahasa Inggrisnya populer dengan sebutan *Public Relations* merupakan salah satu bagian dari kajian Ilmu Komunikasi yang paling pesat berkembang. Pada masa sekarang ini, banyak organisasi semakin menyadari pentingnya mengaplikasikan kegiatan kehumasan menjadi salah satu bagian yang integral dan tak terpisahkan dalam kegiatan manajerial organisasi sehari-hari. Berbagai macam organisasi mulai mengakui bahwa banyak dari tujuan organisasi semakin mudah tercapai dan banyak pula permasalahan-permasalahan

yang dihadapi oleh organisasi bisa dihindari atau mendapatkan solusi yang memuaskan dengan mengaplikasikan kegiatan kehumasan yang tepat dalam organisasi mereka.

Perkembangan kehumasan saat ini juga didasari oleh semakin tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peran humas dalam masyarakat dan berbagai macam sektor, baik sektor industri dan bisnis, pemerintahan, sosial, ekonomi dan sektor lain yang membutuhkan peran Humas dalam membantu memecahkan berbagai macam persoalan. Kehumasan yang bersifat dinamis tersebut juga menjadi bagian krusial dalam membatasi definisi dari para praktisi humas. Cukup banyak definisi Humas yang telah diungkapkan tersebut saling berbeda, tetapi pada prinsipnya dan pengertiannya adalah sama.

2.2.2 Humas dan Komunikasi

Seperti telah disinggung sedikit sebelumnya, kajian tentang kehumasan adalah bagian dari kajian Ilmu Komunikasi. Karena merupakan bagian dari Ilmu Komunikasi maka kajian kehumasan akan selalu dipandang dari perspektif induk ilmunya yaitu berkomunikasi. Singkatnya, kegiatan atau praktik kehumasan adalah kegiatan berkomunikasi. Dalam pengertian yang cukup singkat dan sederhana tersebut, ada beberapa kata kunci yang cukup penting, yaitu : manajemen, komunikasi, organisasi, dan publik. Empat kata kunci inilah yang

selanjutnya merupakan elemen dasar untuk memahami semua kegiatan kehumasan.

2.2.3 Peranan Humas

Peran humas sebagai praktisi atau profesional dalam suatu instansi atau perusahaan adalah dapat memahami fungsi humas dan komunikasi organisasi. Hal tersebut merupakan kunci untuk pengembangan peran praktisi humas dan pencapaian profesionalisme dalam humas. Terdapat 4 (empat) peran utama humas yaitu:

1. Sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya.
2. Membina *relationship*, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.
3. Peranan *back up management*, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.
4. Membentuk *corporate image*, artinya peranan *public relations* berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.

Dipaparkan secara rinci, peranan humas (*communicator, relationship, back up management, corporate image*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai *communicator* dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan, prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik (*two way traffic reciprocal communication*). Dalam hal

ini, di satu pihak melakukan fungsi komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi, dilain pihak komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini publik (*public opinion*).

2. Membangun atau membina hubungan (*relationship*) yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan eksternal, khususnya dalam menciptakan saling mempercayai (*mutually understanding*) dan saling memperoleh manfaat bersama (*mutually symbiosis*) antara lembaga/organisasi perusahaan dan publiknya.
3. Peranan *back up management* yaitu sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.
4. Peranan dalam *corporate image* atau yang biasa disebut dengan citra perusahaan yaitu Humas mempunyai peran untuk membuat citra perusahaan dianggap baik oleh mata publiknya. Dengan melakukan hal-hal yang memiliki dampak untuk perusahaan untuk menjalankan tujuan perusahaan (Ruslan, 2005).

Sebagai seorang Humas dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan seluruh unsur sumber daya yang ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemampuan sebagai fungsi manajemen teknis (*technical management*) dan kemampuan berperan sebagai manajer profesional (*managerial skill*).

Humas sebagai salah satu fungsi manajemen di perusahaan yang berperan untuk menyaring informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan memfasilitasi kegiatan komunikasi untuk memberikan pemahaman kepada publik eksternal dan internal. Berfungsi tidaknya seorang humas dalam sebuah perusahaan maupun instansi dapat diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-cirinya. Ciri-ciri humas menjalankan perannya antara lain :

- a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik.
- b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
- c. Sasaran kegiatan humas adalah publik eksternal maupun publik internal.
- d. Operasional humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya ketidaknyamanan dari pihak eksternal terhadap perusahaan.

Humas akan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan citra positif dengan memahami ruang lingkup dari perusahaan tersebut. Beberapa ruang lingkup kerja humas dalam suatu instansi ataupun perusahaan pada publik eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan dengan pelanggan (*customer relation*) dalam kegiatan ini humas memberikan informasi kepada pelanggan tentang hal-hal yang belum jelas, memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga pelanggan merasa puas dan percaya terhadap perusahaan.
- b. Hubungan dengan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan (*Community relations*). Dalam hal ini humas harus menjaga hubungan baik dengan penduduk ataupun masyarakat sekitar perusahaan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan bisa memperlancar tujuan dari perusahaan.
- c. Hubungan dengan media massa. Dalam hal ini humas juga harus membuat hubungan baik kepada media yang mempunyai dampak baik kedepannya, ketika perusahaan melakukan kegiatan maka akan dengan mudah meminta media untuk melakukan kegiatan publikasi.
- d. Hubungan dengan instansi-instansi pemerintah (*government relation*), merupakan salah satu peran humas yang mencakup penyelenggaraan hubungan komunikasi dua arah dengan instansi-instansi pemerintah

2.2.4 Fungsi Humas Dalam Organisasi

Setelah kita membahas mengenai humas sebagai salah satu fungsi manajemen penting yang tidak bisa diabaikan oleh organisasi modern. Don Barnes, seorang praktisi *Public Relations* kawakan dari Australia

menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4 fungsi humas dalam organisasi, yaitu:

1. Memberikan saran kepada pihak manajemen hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang diambil, serta dampak dari kebijakan itu bagi publik.
2. Mengoordinasikan berbagai kegiatan komunikasi organisasi
3. Menyediakan sarana bagi upaya-upaya organisasi untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan publik
4. Mencari tahu/mencari informasi tentang opini publik terhadap organisasi (Johnston dan Zawawi, 2000).

Dari empat fungsi utama humas di atas, bisa disimpulkan bahwa kegiatan humas yang utama adalah merencanakan serta mengelola dengan baik segala kegiatan komunikasi organisasi sebagai upaya untuk menjalin hubungan timbal balik yang positif dengan publik. Selain itu, kalau dicermati dengan lebih seksama, empat fungsi utama humas tersebut masih dapat dipersempit lagi menjadi 2 fungsi dasar yaitu:

1. Humas sebagai penyampai informasi

Di sini humas bertugas untuk menyampaikan segala informasi penting mengenai organisasi kepada publik. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan publik dapat memahami sudut pandang organisasi tentang suatu isu atau permasalahan tertentu.

2. Humas sebagai pencari informasi

Di sini humas bertugas untuk mencari segala informasi yang berkenaan dengan opini publik (pendapat, keluhan, pemikiran, kritikan, pujian, kepuasan, dan sebagainya) tentang organisasi. Dengan mengetahui opini publik secara pasti, humas dapat memberikan masukan kepada pihak organisasi berdasar pada opini tersebut sehingga organisasi diharapkan tidak akan mengambil keputusan yang keliru yang akan merugikan posisi organisasi itu sendiri.

2.3 Sosialisasi

2.3.1 Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah peyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan seseorang bertindak dan bersikap sebagai anggota masyarakat yang efektif, yang menyebabkan ia efektif, yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Stepen P. Robins (2006), sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari komunikasi disamping sebagai produksi dan pengetahuan dalam hal ini komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar tetap sesuai dengan apa yang menjadi perilaku kelompoknya. Jadi, dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan cara mengkomunikasikan kepada publiknya.

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan sosialisasi adalah salah satu fungsi komunikasi yang sesuai untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat di mana ia tinggal. Jadi sosialisasi dilakukan dengan mengkomunikasikan informasi kepada anggotanya.

Sosialisasi dalam arti yang luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerahtherimakan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses sosialisasi bertujuan untuk :

1. Member keterampilan yang dibutuhkan individu untuk hidupnya di masyarakat
2. Mengajarkan individu untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan berbicara
3. Melatih pengendalian fungsi-fungsi organic melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat
4. Membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada dalam masyarakat

Dari semua definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah usaha yang dilakukan seseorang, masyarakat atau lembaga untuk memberikan pengajaran dan pendidikan melalui teknik

komunikasi dan menyediakan sumber pengetahuan kepada publik agar bertindak sesuai dengan masyarakat dimana ia tinggal dan dapat berfungsi dalam masyarakat tersebut.

Menurut Narwoko dan Bagong (2007), proses sosialisasi yang relevan bagi pembentukan kepribadian dapat dibedakan atas :

1. Proses sosialisasi yang dikerjakan (tanpa sengaja) lewat proses interaksi sosial.
2. Proses sosialisasi yang dikerjakan (secara sengaja) lewat proses pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan pelaksanaan proses sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya proses ini bukanlah suatu aktivitas yang bersifat sepihak. Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau disebut dengan aktivitas melaksanakan sosialisasi dan pihak yang kedua adalah aktivitas pihak yang disosialisasikan.

2.4 Program Keluarga Berencana

2.4.1 Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur jarak kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Mardiyanto, 2017). Selain itu

Menurut UU No. 52 tahun 2009 Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa KB adalah upaya manusia untuk mengatur atau membatasi kelahiran, mengatur jarak kehamilan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2.4.2 Tujuan Program Keluarga Berencana

Tujuan KB secara umum yakni membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran anak diperoleh suatu keluarga yang kecil dan bahagia. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi. (Sulistyawati, 2012). Tujuan khusus program keluarga berencana yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan. Melalui KB diharapkan masyarakat dapat lebih terjamin dalam kesejahteraan hidupnya.

2.4.3 Sasaran Program Keluarga Berencana

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah pasangan usia subur yang bertujuan untuk

menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan.

1. Pasangan Usia Subur

Pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang umur istrinya antara 15 - 49 tahun, karena kelompok ini merupakan merupakan pasangan yang aktif melakukan hubungan seksual dan setiap kegiatan seksual dapat mengakibatkan kehamilan. PUS diharapkan secara bertahap menjadi peserta keluarga berencana yang aktif sehingga memberi efek langsung terhadap penurunan tingkat fertilitas.

Usia antara 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita, karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang usianya berada pada periode ini disebut wanita usia subur (WUS), dan apabila memiliki status kawin maka kita dapat menyebutnya sebagai pasangan Usia Subur (PUS).

2. Aseptor KB

Menurut Saryono (2010) Aseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun nonprogram, Aseptor terbagi menjadi 4 jenis:

1) Aseptor KB Baru

Aseptor KB Baru adalah PUS yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami keguguran atau kelahiran.

2) Aseptor KB Lama

Aseptor KB Lama adalah PUS yang melakukan kunjungan ulang termasuk PUS yang menggunakan alat kontrasepsi kemudian pindah atau ganti cara atau alat lain.

3) Aseptor KB Aktif

Aseptor KB Aktif adalah PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi.

4) Aseptor KB Aktif Kembali

Aseptor KB Aktif Kembali adalah PUS yang telah berhenti menggunakan alat kontrasepsi selama 3 bulan atau lebih yang tidak diselingi kehamilan dan kembali menggunakan alat kontrasepsi baik dengan cara yang sama maupun berganti cara.

Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dari program KB, dengan tujuan menurunkan tingkat fertilitas melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2016. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk di Kota Bandar Lampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.2 Sejarah Singkat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Menurut undang-undang nomor 52 tahun 2009 pada pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Pada pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah

membentuk badan koordinasi keluarga berencana daerah yang disingkat BKKBD ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Di kota Bandar Lampung BKKBN mengalami perubahan nama serta beberapa tugas dan fungsi yang sedikit berbeda. Sebelum menjadi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, instansi ini memiliki nama badan koordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (BKKBPP). Setelah disahkannya peraturan daerah kota Bandar Lampung no 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota 43 Bandar Lampung dan peraturan walikota Bandar Lampung no 44 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Bandar Lampung BKKBPP berubah nama menjadi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mana instansi ini berfokus pada hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Bandar Lampung.

3.3 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

Visi : Mewujudkan Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

3.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung

Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk. keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga.
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

- h. Pelaksanaan pelayanan KB.
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsionai; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan KB.
- b. Penghimpunan dan penyusunan program kegiatan dan pemberian informasi.
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga. kepegawaian, hukum masyarakat: dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi. ganti rugi, tindak lanjut lhp dan pengelolaan aset.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat dibantu oleh : 1) sub bagian penyusunan program dan informasi; 2) sub bagian umum dan kepegawaian; 3) sub bagian keuangan dan aset.

3. Sub Bagian Program Dan Informasi

- a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan, anggaran dan pemberian informasi.
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi kegiatan.
- c. Menghimpun dan menyusun laporan kerja instansi.
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga. urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas.
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai. kenaikan pangkat, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai dan pensiun.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- a. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
- b. Melakukan pengelolaan administrasi aset.
- c. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan reralisasi anggaran.
- d. Melaksanakan tugas iain yang diberikan atasan.

6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakkan

Bidang penyuluhan dan penggerakkan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang penyuluhan dan penggerakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis darah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menyelenggarakan pergerakan dibantu oleh :1) seksi penyuluhan dan kie: 2) seksi advokasi dan pergerakan; 3) seksi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

7. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan KIE program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Menyiapkan bahan untuk fasilitator penyuluhan dan KIE program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan KIE program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Advokasi dan Penggerakkan

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi dan pergerakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Menyiapkan bahan untuk fasilitator advokasi dan pergerakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- c. Melaksanakan advokasi dan penggerakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana: mengevaluasi pelaksanaan advokasi.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Seksi Pendayagunaan Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan PKB/PLKB serta mekanisme operasional lini lapangan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan IMP.
- d. Menyiapkan bahan untuk fasilitator pendayagunaan PKB/PLKB dan imp program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan memfasilitasi peran dan fungsi PKB/PLKB dan IMP.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Bidang Keluarga Berencana

Bidang keluarga berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang

keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang keluarga berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi.
- d. Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keluarga berencana.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas keluarga berencana.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibantu oleh : a) seksi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi: b) seksi jaminan pelayanan KB: c) seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB.

11. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

- a. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan pendistribusian alat kontrasepsi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

- b. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.
- c. Melakukan stock opname jumlah alat kontrasepsi yang tersedia.
- d. Mengawasi pendistribusian alat kontrasepsi ke klinik pemerintah dan non pemerintah.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Seksi Jaminan Pelayanan KB

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK).
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas.

13. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB

- a. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan serta peningkatan kesertaan KB pria.
- b. Melakukan pembinaan kesertaan KB.

14. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R).
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibantu oleh : a) seksi pemberdayaan keluarga sejahtera; b) seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; c) seksi bina ketahanan remaja.

15. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga.
- b. Memfasilitasi bimbingan teknis ke kecamatan.
- c. Memperluas jejaring kerja kemitraan dengan instansi/lembaga lain.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

16. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia.
- b. Melakukan bimbingan teknis di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
- c. Memfasilitasi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia tingkat kecamatan dan kelurahan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

17. Seksi Bina Ketahanan Remaja

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ketahanan remaja.
- b. Melakukan bimbingan teknis di bidang ketahanan remaja.
- c. Melakukan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan program remaja.
- d. melalui kesehatan reproduksi.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

18. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengendalian penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga.
- b. Pelaksantan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang.
- c. Pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga.
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang sistem informasi keluarga.
- e. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah.
- f. Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- g. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian Penduduk.
- h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian Penduduk.
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian penduduk.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dibantu oleh : a) seksi pemaduan dan snkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; b) seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; c) seksi data dan informasi.

19. Seksi Peraduan dan Sikronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

- a. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga.
- b. Melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas data penduduk.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

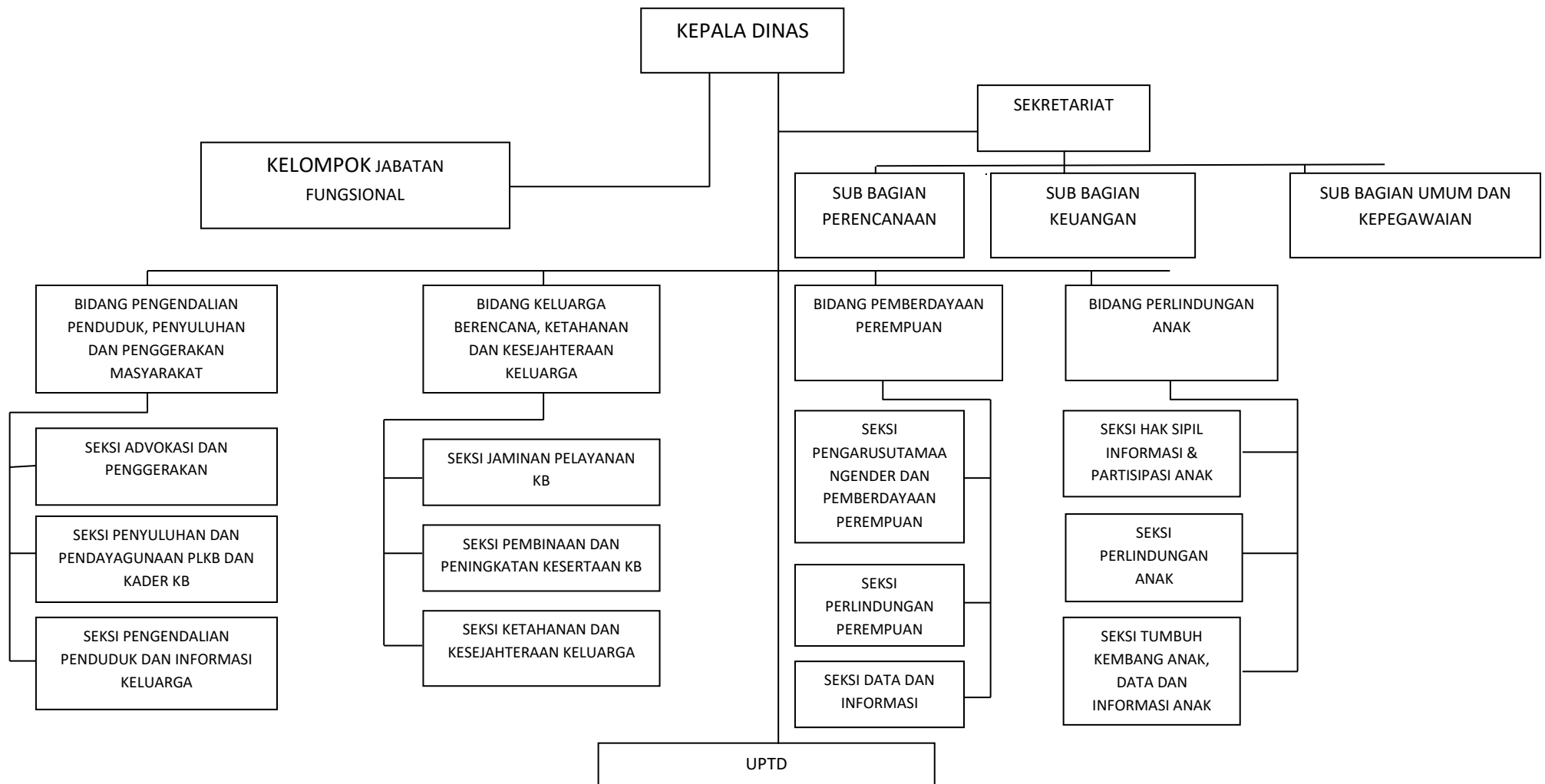
20. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

- a. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk.
- b. Mengevaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk.
- c. Melakukan tehnik dan memfasilitasipembinaan pengendalian penduduk.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

21. Seksi Data dan Informasi

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi.
- b. Membuat laporan bulanan, tahunan hasil pengumpulan pengendalian penduduk.
- c. Melakukan analisa data hasil program pengendalian penduduk.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung



Sumber : Arsip Dokumen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan tentang Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mensosialisasikan Program KB dengan dipandu teori Rosady Ruslan, dapat disimpulkan bahwa :

1. sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik, yang pada intinya Humas harus bisa menangkap keinginan dan kebutuhan masyarakat kemudian menyampaikannya kepada pimpinan dan kemudian disampaikan kembali ke masyarakat.
2. membina *relationship* yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik, dalam hal ini humas harus merumuskan masalah yang sedang dihadapi organisasi serta diharapkan bisa memberikan pemikiran pada atasan.
3. peranan sebagai pendukung dalam organisasi atau perusahaan, yang pada intinya humas harus bisa menghadapi perkembangan zaman sekarang ini dengan menguasai teknologi dan informasi dengan menyebarkan

informasi mengenai program-programnya baik melalui media massa dan juga melalui pesan secara langsung

4. membentuk *corporate image*, yang intinya humas harus memiliki rencana yang baik untuk memajukan organisasinya serta mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat dan bisa menghadapi dan mengatasi persoalan yang terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung tentang peran yang dilakukan dalam mensosialisasikan Program KB, maka saran yang ingin penulis berikan yakni, Hendaknya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menjaga pencapaian-pencapaian prestasi yang telah diraih yaitu *image* yang cukup baik dikalangan masyarakat dan meningkatkan lagi dalam pelayanan serta perannya agar menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Johnston, & Zawawi. (2000). *Manajemen Periklanan: Konsep Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mantra, Ida Bagoes. (2015). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiyanto. (2017). *Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPk Dan Terkait Di Jawa Timur*.
Jurnal Keluarga
- Narwoko & Bagong. (2007). *Sosiologi Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nurtjahjani, F., & Trivena, S.M. (2018). *Public Relations Citra & Praktek*.
Malang: Polinema Press
- Ruslan, Rusady. (2005). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen. P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia
- Silviani, Irene. (2020). *Public Relations Sebagai Solusi Komunikasi Krisis*.
Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.
- Sulistiyawati, Ari. (2002). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika.